



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA**

Jln. Letjend. Sukowati No. 51 Kode Pos 50724 Telp/Fax (0298) 326674
Faks. (0298) 326674 Website www.dprd-salatigakota.go.id
E-mail dprd@salatigakota.go.id
S A L A T I G A

Salatiga, 11 November 2024

Nomor : 100.3/504/UMP
Lampiran : -
Perihal : **Undangan.**

Kepada :
Yth. Pj. Wali Kota Salatiga
di -
S A L A T I G A

Dasar: Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 1 November 2024 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kota Salatiga Bulan November 2024.

Dalam rangka melaksanakan fungsi Pembentukan Perda DPRD Kota Salatiga, khususnya dalam pembahasan Raperda tentang Perlindungan Anak, perlu dilaksanakan pembahasan materi dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, berkenaan Saudara Pj.Wali Kota Salatiga untuk menugaskan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Sosial, dan Kepala Bagian Hukum Setda untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat Pansus Raperda tentang Perlindungan Anak, besok pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 14 November 2024
Jam : Pukul 09.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Garuda DPRD Kota Salatiga
Acara : *Rapat Dengar Pendapat Pembahasan Raperda Perlindungan Anak.*
Keterangan : materi dapat diunduh
<https://bit.ly/BahanRapatPansus1>

Demikian atas kehadirannya, diucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA,

DANCE ISHAK PALIT, M.Si

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan DPRD Kota Salatiga;
2. Segenap Pansus (sebagai undangan);
3. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
4. Sekretaris DPRD Kota Salatiga;
5. Tim Koordinasi Raperda Pemerintah Kota Salatiga.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Jln. Letjen. Sukowati No.51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326674
Faks. (0298) 326674 [Website www.dprd-salatigakota.go.id](http://www.dprd-salatigakota.go.id)
E-mail dprd@salatigakota.go.id

DAFTAR HADIR PANSUS I DPRD KOTA SALATIGA

- Hari / Tanggal** : Kamis, 14 November 2024
Waktu : 09.00 Wib s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Garuda DPRD Kota Salatiga.
Acara : Rapat Dengar Pendapat Pembahasan Raperda tentang Perlindungan Anak dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

NO	nama	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Pudjo Suseno, S.E	KETUA	1.
2.	H Basirin	WAKIL KETUA	2.
3.	Siti Inayah, A.Md	SEKRETARIS	3.
4.	M. Miftah	ANGGOTA	4.
5.	Andreas Yosep Kristianto	ANGGOTA	5.
6.	Laurens Adrian, S.T.	ANGGOTA	6.
7.	Agus Warsito	ANGGOTA	7.

Mengetahui,
PANSUS I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA,

PUDJO SUSENO, S.E



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA**

Jln. Letjen. Sukowati No.51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326674
Faks. (0298) 326674 Website www.dprd-salatigakota.go.id
E-mail dprd@salatigakota.go.id

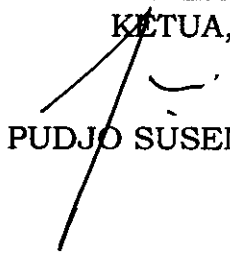
DAFTAR HADIR PANITIA

Hari / Tanggal : Kamis, 14 November 2024
Waktu : 09.00 Wib s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Garuda DPRD Kota Salatiga.
Acara : Rapat Dengar Pendapat Pembahasan Raperda tentang
Perlindungan Anak dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana.

No	NAMA	INSTASI	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.	Sri Hartini	DP3 APPKB	3.
4.	Supriyana	DP3 APPKB	4.
5.	Andriani	Bag. Hukum	5.
6.	Sih Nur Solikhul	Disdik	6.
7.	Enny Rusilawati	DP3 APPKB	7.
8.	Ananda Galuh K.P.	DP3 APPKB	8.
9.	Tri Anita Noviana	DP3 APPKB	9.
10.	Vivian	DP3 APPKB	10.
11.	Baruni Tedjo	Dinsol	11.
12.	S. Adi S.	~	12.
13.	Winner N.J.	Hukum	13.
14.	Hanif Alimi	~	14.
15.	Nayol	~	15.
16.	Joni F.	Setwan	16.
17.	Firda Hasina	Setwan	17.
18.	Henry S	Setwan	18.
19.			19.

20.			20.	
21.				21.
22.			22.	
23.				23.
24.			24.	
25.				25.

Mengetahui,
PANSUS I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA,


PUDJO SUSENO., S.E

SUSUNAN ACARA
RAPAT PANSUS I RAPERDA PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2024

Hari / Tanggal : Kamis / 14 November 2024
Waktu : Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai
Tempat : Ruang Rapat DPRD Kota Salatiga
Acara : Rapat Pansus Raperda Perlindungan Anak

Pelaksanaan Rapat :

WAKTU (JAM)		URAIAN RAPAT	
09.00 – 09.15	:	Pembukaan oleh Pimpinan Rapat	
09.15 – 10.00	:	Paparan materi dari Pimpinan Rapat dan Leading Sektor	
10.00 – 12.00	:	Pembahasan	
13.00	:	Kesimpulan dan Penutup	



KOMISI A
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326674
Faks. (0298) 326674 Website www.dprd-salatigakota.go.id
E-mail dprd@salatigakota.go.id

RAPAT PANSUS I DPRD KOTA SALATIGA
RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

I. Dasar Pelaksanaan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
2. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 1 November 2024 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kota Salatiga Bulan November 2024.

II. Pelaksanaan :

- a. Hari : Kamis
- b. Tanggal : 14 November 2024
- c. Jam : 09.00 Wib s/d Selesai.
- d. Acara : Rapat Dengar Pendapat Pansus I terhadap Raperda Perlindungan Anak
- e. Peserta : 20 orang

III. Peserta Rapat

Pansus I:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1. Pudjo Suseno, SE | Ketua |
| 2. Basirin | Wakil Ketua |
| 3. Andreas Yosep K | Anggota |
| 4. Laurens Adrian, ST | Anggota |

IV. Eksekutif:

1. DP3AP2KB
2. Dinas Pendidikan
3. Dinas Sosial
4. Bagian Hukum Setda

V. Pencatat :

- Heny Setyorini, S.H, M.H
- Tony Rudyanto, SM
- Firda Hasina Larasati, SH

VI. Hasil :

- Bp. Pudjo : Membuka rapat pansus sekaligus mengemukakan bahwa pada bahasan pada hari ini akan melakukan brainstorming guna inventarisasi permasalahan perlindungan anak di Kota Salatiga.
- Ibu Hartini : Beliau menyampaikan tentang gambaran umum perlindungan anak di Kota Salatiga
- Ibu Andri : Menjelaskan bahwa Raperda perlindungan anak merupakan Raperda inisiatif Wali Kota dalam Propemperda Tahun 2024 dengan leading sektor dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Dijelaskan beliau bahwa pengaturan mengenai Perlindungan Anak tidak harus dalam bentuk Perda, namun perlu jaminan untuk perlindungan anak di Kota Salatiga. Dalam hal ini Raperda yang diajukan meliputi 10 Bab dan 38 Pasal.
- Bp. Basuki : Agar permasalahan terkait perlindungan anak dalam kasus KDRT untuk diperhatikan, Beliau juga memberikan masukan dari Dinas Sosial terkait materi muatan Raperda Perlindungan Anak. Anak berhadapan dengan hukum, telah terjadi 4 kasus. Kasus anak berhadapan dengan hukum salah satu diantaranya anak menjadi korban. Di Kota Salatiga sendiri, kasus anak berhadapan dengan hukum terjadi pada anak bukan penduduk Kota Salatiga. Oleh karena itu, Dinsos dalam hal ini bekerjasama dengan YAPI, dimana Yayasan ini memberikan bantuan untuk anak. Ada data dilapangan untuk data panti asuhan sebagai anak diluar panti sebagai anak penerima manfaat panti. Terkait kasus manipulasi surat keterangan kelahiran menyangkut asal usul anak. Sehingga kutipan akta kelahiran menjadi asli tapi palsu. Kasus terdapat 151 kasus di Kota Salatiga. Untuk itu anak perlu perlindungan khusus dalam kasus tertentu baik secara fisik, seksual, maupun psikologis. Penanganan kasus tersebut merupakan salah satu SPM di Dinsos.
- Bp. Basirin : Identifikasi atas kasus harus jelas. Ada kejelasan surat keterangan kelahiran.
- Ibu Hartini : Terkait permasalahan tersebut beliau mengusulkan untuk mengundang Disdukcapil dan Dinas Kesehatan. Mengenai perlindungan anak sendiri dikemukakan beliau ada 250 Forum Anak di seluruh Kota Salatiga. Didalamnya ada pelatihan untuk pelopor dan pelapor. Namun demikian ditemui dilapangan, apabila yang terlibat dalam kasus tersebut adalah guru mengakibatkan kendala. Untuk itu perlu diupayakan bagaimana anak yang melapor tidak mendapatkan diskriminasi. Dalam Forum Anak, anak telah dilatih sebagai konselor sebaya. Diharapkan dengan adanya Perda tentang Perlindungan Anak ini akan dapat menaungi semua masalah yang terjadi. Permasalahan juga terjadi pada Cantin dibawah 18 tahun. Di Provinsi terdapat 2 panti dimana ada rumah aman untuk korban guna memisahkan sementara antara pelaku dengan orang terdekat.
- Bp. Andreas : 1. Asal usul anak sangatlah penting. Ada efek karambol didalamnya. Harus ada surat keterangan lahir sepengetahuan badan khusus yang tidak bisa dimanipulasi. Apakah sudah ada solusi untuk permasalahan terkait kasus kekerasan terhadap anak. Mengharapkan untuk anak korban kekerasan untuk

dapat diberikan Pendidikan secara normal dan ada rehabilitasi untuk bisa beraktifitas kembali secara normal. Oleh karena itu perlu adanya kajian khusus bagaimana anak dibawah umur untuk diberikan perlindungan.

2. Perlindungan anak untuk korban kekerasan ataupun hubungannya dengan pengajar, karena anak-anak jaman sekarang merasa dilindungi, sehingga tidak ada yang bisa mengendalikan. Kecenderungan anak-anak menjadi tidak hormat dengan pengajar. Pendidik tidak punya ruang gerak yang bebas untuk mendidik. Oleh karena itu, pokok bahasan untuk dikaji ada Perda-Perda yang disinergikan. Ada hal-hal yang harus dibedakan kasusnya dalam Perda Perlindungan Anak. Moralitas anak-anak sudah menurun sehingga ada perbedaan anak-anak yang mau benar-benar belajar dengan yang tidak. Untuk itu perlu sinergi dengan Perda yang lain.

Bp. Basirin : Raperda ini telah sesuai dengan peraturan di atasnya. Hanya saja, DP3A sebagai ujung tombak Perda apa yang diusulkan bisa dimasukkan untuk memperkaya isi Perda. Apakah Perda ini bisa berlaku untuk orang diluar Kota Salatiga. Untuk kasus adopsi kuncinya ada di yang membantu kelahiran. Penyimpangan harus diatasi dari kelanjutan generasi. Dalam hal ini Dinas Kesehatan untuk identitas untuk dimunculkan. Kasus adopsi baik orang Salatiga maupun di luar Salatiga. Apabila terdapat pasal-pasal belum muncul maka di Perwali untuk dipertegas.

Ibu Siti Nur Sholikhah : Untuk perlindungan guru di Perda ini ada tentang guru. Istilah disabilitas bisa diganti dengan difabilitas. Ruang pemulihan untuk diperhatikan.

Bp. Andreas : Fasilitasi untuk anak yang hamil diluar nikah.

Bp. Basuki : Ada tanggung jawab sistemik dari Dinas Kesehatan dan Disdukcapil. Dalam kasus hanya mendasarkan pada KIA tanpa KTP. Di lapangan belum ada system pendokumentasian untuk foto ibu yang melahirkan. Untuk kasus anak, kelanjutan sekolah bisa mengambil PKBM paket C dan apabila dimungkinkan untuk si ibu bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. untuk anak korban kekerasan dimintakan bantuan dari YAPI. Rekomendasi Dinas Sosial dalam hal ini hanya untuk yang orang tuanya Salatiga.

Bp. Andreas : Bagaimana dengan kasus anak diluar nikah yang diasuh oleh keluarga yang lain.

Bp. Basuki : Statusnya menjadi numpang KK famili lain, namun yang perlu diwaspadai adalah akta kelahiran.

Bp. Laurens : Adopsi untuk diperhatikan. Hal tersebut muncul karena birokrasi yang panjang terkait adopsi anak, sehingga banyak muncul masalah asal usul anak.

Bp. Andreas : Perlu ada aplikasi di Disdukcapil dan Dinas Kesehatan guna mengatasi masalah tersebut. Perlu loncatan teknologi harus diperhatikan dalam Perda ini.

Bp. Laurens : Anak yang bekerja dalam dunia usaha. Ada banyak LSM yang mempermasalahkan.

Bp. Basirin : Untuk ada Perda tersendiri untuk perlindungan guru.

Ibu Andri : Sudah ada Perda nomor 6 Tahun 2013 mungkin bisa diubah.

Bp. Basirin : Mengemukakan terkait adanya guru baru yang membuli guru lama karena kesenjangan penguasaan teknologi.

- Ibu Andri : Dalam permasalahan asal usul anak, Dinas Dukcapil telah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan.
- Ibu Hartini : Bab III tentang Kewajiban Anak, Pasal 11 tentang guru dan Pasal 9 sudah diatur tentang anak didik hormat kepada guru. Ketentuan tersebut akan dipertegas lagi dalam Perwali.
- Ibu Andri : Ada koordinasi dengan Pemda lain serta provinsi namun mekanismenya belum ada.
- Bp. Basirin : Menyakan terkait Salatiga sebagai buangan PMKS.
- Bp. Basuki : Mengemukakan bahwa panti PMKS di Salatiga memadai, namun anggaran minim. Untuk Provinsi Jawa Tengah sendiri overload, sehingga muncul kesepakatan kabupaten dan kota lain untuk tidak menggeser. Untuk permasalahan orang dengan gangguan jiwa ditangani oleh Dinsos, sedangkan warga dengan gangguan jiwa ditangani oleh Dinas Kesehatan.
- Bp. Pudjo : Menutup rapat Pansus. Dan memerintahkan pada pertemuan berikutnya pada hari Jumat menghadirkan Disdukcapil, Dinas Kesehatan, dan Bagian Kesra.

V Penutup

Demikian Rapat Pansus I DPRD Kota Salatiga dilaksanakan agar dapat menjadikan periksa. Terima Kasih.

PENCATAT

HENY SETYORINI, SH., MH

DOKUMENTASI KEGIATAN

